

PEMERINTAH KABUPATEN BONE



**RENCANA KERJA
TAHUN 2022**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE**



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 48 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2020 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I : Dinas Pendidikan
Lampiran II : Dinas Kesehatan

Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah

Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Juli 2021

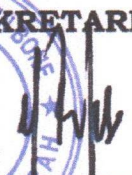
BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 48

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada tuhan yang maha kuasa, karna pada tahun 2022 ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone telah selesai menyusun Rencana Kerja Tahun 2021

Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai pedoman dan arahan pengelolaan Keuangan yang hendak dicapai pada priode 2018 - 2023, renstra merupakan pedoman dalam penyusunan: (1) rencana kerja(renja); (2) rencana kerja dan anggaran (RKA);(3) laporan tahunan; dan (4) laporan akutabilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP); (5) rencana/program Pengelolaan Keuangan daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bone.

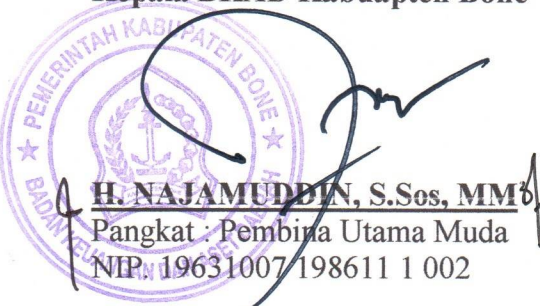
Dalam rencana strategis (renstra) perubahan tahun 2018 -2023. Ini terdapat tujuan dan sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Bone yaitu mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan berkesinambungan dengan Sasaran meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang Akintabel secara berkesinambungan dan meningkatkatnya Akuntabilitas Kinerja.

Kami sadar bahwa didalam penyusunan rencana strategis (renstra) perubahan tahun 2018-2023 ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran demi perbaikan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Bone sehingga visi Kabupaten Bone adalah Masyarakat kabupaten Bone yang MABESSA (Mandir, Berdaya Saing, dan Sejahtera).

Dan akhirnya, semoga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 3 tahun kedepan dapat lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna

Watampone, 29 Juli 2021

Kepala BKAD Kabuapten Bone



H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631007198611 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. 1. Latar Belakang 1

1. 2. Landasan Hukum 3

1. 3. Maksud dan Tujuan 4

1. 4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD 16

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bone 25

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 40

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 40

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 45

3.3 Program dan Kegiatan 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB V PENUTUP 63

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang keuangan daerah.

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- OPD.

1. 2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone mengacu pada:

1. Undang- Undang Nomor 29 tahun 1959 tetang pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tenrang Perubaha kedua atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor5679)
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perauran Perundang- Undangan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5234)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 -2032 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2)
10. Peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 9 tahun 2016 tentang Peruvbahan Atas Persturan daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005- 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 nomor 3)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9)
 13. Peraturan Bupati bone nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 55)
 14. Peraturan Bupati Bone nomor 87, Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Persaturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Bone Tahun 2020 (Berita Daerah kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 31)

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone adalah merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 dan untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Dalam mencapai maksud diatas, tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra
- b. Mengidentifikasi kinerja pelayanan BPKAD.
- c. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis BPKAD 1 (satu) tahun mendatang.
- d. Menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan target pembangunan BPKAD selama 1 (satu) tahun mendatang.
- e. Menetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang disertai pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun mendatang.
- f. Menetapkan rencana kerja dan pendanaan BPKAD selama 1 (satu) tahun mendatang.

1. 4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan mengemukakan capaian-capaian pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra periode sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan hasil penelaah kebijakan nasional dan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikatornya, serta perumusan program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan hasil perumusan program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Kabupaten Bone dalam menyusun program kegiatan BPKAD Kabupaten Bone, selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 2 (dua)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kunci BPKAD Kabupaten Bone yang merupakan representasi dari Misi ke 1 (satu) **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).”** dengan program strategis pemerintah daerah yaitu: ***Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah***, yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yaitu:

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,650	147,203,254,283	1,579	24,887,919,950	963	18,754,552,980	2,493	44,233,158,730	32.6	30.0	BPKAD	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang di bayar	1,805	127,720,018,500	361	21,260,911,450	285	16,872,675,161	646	38,931,520,326	35.8	30.5		Belanja jasa Kantor Telpon Air dan Listrik
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang menerima tunjangan	545	4,118,201,298	58	517,444,800	38	329,920,499	147	673,179,184	27.0	16.3		Belanja jasa kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Jasa Programmer
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	260	1,365,893,503	52	500,000,000	52	249,990,000	104	559,990,000	40.0	41.0		Belanja Surat kabar majalah
		Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah SPDP	5,000	3,642,828,112	1,100	687,000,000	584	353,175,120	1,584	1,173,374,120	31.7	32.2		Belanja Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran	40	10,356,312,870	8	1,922,563,700	4	948,792,200	12	2,895,095,100	30.0	28.0		ATK Prangko, Material cetak dan pengandaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Perasana Aparatur yang kondisi	675	4,825,905,719	149	1,587,272,600	75	218,608,429,788	210	2,770,905,888	31.11	57.42	BPKAD	

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rensta PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rensta PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangka t Daerah Penang ung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			baik												
		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor	25	64,575,000	3	34,500,000	3	19,500,000	8	45,250,000	32.0	70.1		Pengadaan AC
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	190	849,060,800	31	376,800,000	23	289,478,500	61	749,099,500	32.1	88.2		Mesin absensi komputer printer komputer note book
		Kegiatan Pengadaan Mebeleur	jumlah kebutuhan mebeleur	35	405,825,000	36	176,800,000	-	146,200,000	7	191,200,000	20.0	47.1		Meja Kerja Almari Kursi Tunggu
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	25	588,268,840	4	478,650,600	3	290,976,750	8	713,476,750	32.0	121.3		Alat listrik dan Elektronik belanja peralatan Kebersihan dan pemeliharaan Ruangan
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Mobil dan Motor yang dipelihara	200	1,767,562,800	35	315,000,000	16	148,249,538	56	725,004,638	28.0	41.0		Belanja Bahan Bakar minyak, Penggantian suku cadang, belanja jasa Servis kendaraan
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	200	1,150,613,279	40	205,522,000	30	154,025,000	70	346,875,000	35.0	30.1		Belanja jasa Service Peralatan kantor dan Elektronik
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60	214,200,000	12	117,500,000	3	22,800,000	15	42,800,000	25.0	20.0	BRKAD	

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Kegiatan Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Dana Kas Daerah oleh BUD	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	37,250	1,620,257,621	7,500	278,337,500	3,749	140,162,900	11,199	414,142,650	30.1	25.6		Belanja ATK, Prangko, jasa Kantor, Cetak Penggandaan, makan minum, Perjalanan Dinas
		Program Penujiang Pemerintahan Umum	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	130	364,282,811	6	52,088,500	21	33,021,700	47	87,806,700	36.2		BPKAD	
		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	364,282,811	6	37,778,500	3	23,021,700	9	63,496,700	30.0	17.4		Belanja ATK, Cetak Penggandaan, makan Minum, (Dokumen RKA,DPA)
		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Informasi yang Diupload	100	130,101,004	25	14,310,000	18	10,000,000	38	24,310,000	38.0	18.7		Regulasi 6 Laporan 5 Profil 4 Pengumuman 4 Sakip 2 Kontak 1
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,250	29,749,204,434	18,385	5,468,435,900	9,235	2,688,649,119	27,685	7,760,534,219	30.0	26.1	BPKAD	Belanja ATK, Cetak Penggandaan, Makan minum, Perjalanan dinas Luar daerah
		Penyusunan analisis standar Belanja	Jumlah Dokumen Standar Belanja	6	517,550,000	1	160,094,050	-	55,609,000	-	55,609,000	-	10.7		Belanja Barang Pakai habis, Cetak Penggandaan, Makan Minum,
		Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang	10	651,038,434	2	142,227,500	1	65,126,600	3	173,303,000	30.0	26.6		

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Dokumen Ranperda APBD	10	1,730,733,656	2	413,619,750	-	212,582,850	2	513,997,850	200	29.7		Belanja Pakai Habis, Jasa Kantor, cetak Penggandaan Mekan Minum, Perjanaan Dinas
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD	10	1,492,815,869	2	299,569,250	1	155,486,320	3	380,793,370	300	25.5		Belanja Pakai Habis, Cetak Penggandaan, makan Minum,
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan	5	1,083,741,363	2	174,399,550	1	59,124,050	2	205,424,050	400	19.0		-
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen per KDH tentang Penjabaran Perubahan	5	1,034,368,032	1	208,050,300	-	25,547,450	-	-	-	-		-
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjawaban	5	1,199,895,540	1	278,756,200	-	199,364,900	-	411,749,450	-	34.3		Belanja Pakai Habis, Penggandaan, Makan Minum, Pejanaan Dinas
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban	5	909,749,485	1	214,450,000	-	60,985,500	1	229,281,500	200	25.2		Belanja Pakai Habis,, Belna Cetak Penggandaan, Belanja Makan Minum,

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersedianya sistem informasi keuangan daerah	5	1,221,044,759	1	235,165,000	-	190,949,800	1	440,429,800	20.0	36.1		
		Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi	40	1,760,639,974	1	273,726,300	-	28,225,000	8	296,847,050	20.0	16.9		
		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	15	1,490,340,827	9	235,581,500	5	138,947,286	-	-	-	-		
		Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	Jumlah DPA dan DPPA SKPD	660	1,426,354,551	3	328,205,800	2	209,118,263	134	470,134,263	20.3	33.0		Belanja ATK, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum, Perjalanan Dinas (Dokumen DPA - DPPA SKPD)
		Pengamanan Aset Daerah	Daftar aset yang dimiliki	330	861,968,590	66	188,134,500	25	71,222,500	91	257,283,000	27.6	29.8		Belanja ATK, cetak penggandaan, Perjalanan Dinas
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen PPAS dan NOTA Keuangan APBD	10	578,025,751	66	93,317,400	7	93,317,400	9	181,389,900	90	31.4		Belanja Pakai habis, Cetak Penggandaan, Makan Minum, Perjalanan Dinas
		Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Tertaksananya Monev aplikasi SIMDA	5	496,621,552	2	128,712,200	1	75,000,000	-	-	-	-		

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset	10	654,231,113	1	69,340,950	-	16,528,050	2	96,869,050	20.0	14.8		Belanja Habis Pakai, Belanja Cetak Penggandaan, Makan Minum
		Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang /Jasa	10	371,802,649	2	45,191,000	-	9,124,000	2	72,569,000	20.0	19.5		Belanja Pakai Habis
		Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Faktur Pajak	4,100	528,588,670	820	122,560,750	715	91,948,000	1,535	214,508,750	37.4	40.6		Belanja Cetak, Belanja Pakai Habis, Makan Minum
		Penilaian Barang Milik Daerah	jumlah SKPD yang dinilai	330	613,499,090	66	172,088,800	23	60,361,450	89	178,250,450	27.0	29.1		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Peningkatan Pengelolaan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dibina dalam penggunaan aplikasi penggangan	330	2,109,665,840	66	155,920,000	51	120,323,000	117	328,148,000	35.5	15.6		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Pengelolaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	60	269,569,280	12	21,601,750	5	9,666,700	17	30,216,700	28.3	11.2		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Jumlah SPM yang terbit	35,000	1,443,994,946	7,000	280,072,550	3,500	175,710,000	10,500	474,782,450	30.0	32.9		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Peningkatan Pelaporan Administrasi keuangan Daerah	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	60	1,399,886,803	12	235,395,500	6	128,241,900	18	409,941,900	30.0	29.3		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan, (SK,PA, SK Bendahara, Pajak Rokok, Kesehatan Gratis,

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	330	1,930,875,837	66	349,233,600	34	193,245,700	100	579,279,700	30.3	30.0		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD	3,960	1,023,348,477	792	173,801,000	167	36,775,000	959	225,475,800	24.2	22.0		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan, Perjalanan Dinas
		Pelaporan Aset	Jumlah laporan aset Daerah	10	693,381,107	2	76,871,000	2	40,599,750		174,269,500	40.0	25.1		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan	75	1,138,147,001	15	147,194,700	3	29,973,000	4	181,096,700	24.0	15.9		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Pengelolaan Gaji	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	46,860	1,634,875,236	9,372	245,155,000	4,686	135,545,650	18	404,720,650	0.0	24.8		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan, Perjalanan Dinas
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tidak lanjut temuan atas kerugian negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR	50	949,737,329	12	152,500,000	7	76,986,694	17	154,486,694	34.00	16.3	BPKAD	
		Peningkatan Pelaksanaan TGR	Jumlah Kasus TGR	50	949,737,329	12	152,500,000	7	76,986,694	17	154,486,694	34.0	16.3		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan, Perjalanan Dinas

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Bone, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,

2.2.1. Strength (kekuatan)

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bone dan melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone serta Raperda KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bone;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
3. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

2.2.2. Weaknes (kelemahan)

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja;
3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3. Opportunity (peluang)

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran

berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/ dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bone serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kabupaten Bone disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi ;
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Kabupaten Bone dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4. Treath (tantangan),

1. Terbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.
2. Masih banyak OPD yang menyajikan Laporan Keuangan dan Aset tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Bone Tahun 2020

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			97%	98%	99%	100%	97%	100%	99%	100%	
	Jumlah Rekening yang di Bayar				294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	
					20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	
					47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	
	Jumlah ASN yang menerima tunjangan			109 ASN	107 ASN	107 ASN	107 ASN	109 ASN	107 ASN	107 ASN	107 ASN	
	Jumlah Media yang Menyediakan Bahan Bacaan			52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	
	Jumlah SPPD			1000 SPPD	1100 SPPD	1100 SPPD	1150 SPPD	1000 SPPD	1150 SPPD	1100 SPPD	1150 SPPD	
2	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran			8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur			98%	99%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	
	Jumlah Bangunan Gedung Kantor			1 Gedung				1 Gedung				

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas			3 Unit Motor	2 Unit Motor	1 Unit Mobil		3 Unit Motor		1 Unit Mobil		
	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas			2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		
	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor			AC 3 Unit	1 Unit		5 Unit	AC 3 Unit	5 Unit		5 Unit	
	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan Dinas			2 Unit				2 Unit				
Jumlah Peralatan Gedung Kantor				Komputer/Pc /Lectop 13 Unit	Komputer/Pc 10 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc /Lectop 13 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	
				Mesin Ketik 1 Unit	Mesin Ketik 1 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit	Mesin Ketik 1 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit	
				Mesin Absensi 1 Unit	Mesin Absensi 1 Unit			Mesin Absensi 1 Unit				
				Printer 5 Unit				Printer 5 Unit				
				UPS 3 Unit				UPS 3 Unit				
				Kulkas 2 Unit				Kulkas 2 Unit				
				Kamera 1 Unit				Kamera 1 Unit				
				Proyektor 1 Unit	Printer 6 Unit			Proyektor 1 Unit	UPS 3 Unit	UPS 3 Unit	UPS 3 Unit	
				GPS Pengukur Tanah 1 Unit				GPS Pengukur Tanah 1 Unit				
				7 Unit	Almari 25 Unit	2 Unit	2 Unit	7 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
Jumlah Kebutuhan Mebelur				1 Paket				1 Paket				
Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan				4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	
Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor				Mobil 7 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 7 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	
Jumlah Mobil dan Motor												

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2 yang di Pelihara	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Jumlah Peralatan yang di Pelihara Gedung Kantor			33 Motor Dinas 40 Unit	35 Motor Dinas 40 Unit	35 Motor Dinas 40 Unit	35 Motor Dinas 45 Unit	33 Motor Dinas 40 Unit	35 Motor Dinas 45 Unit	35 Motor Dinas 40 Unit	35 Motor Dinas 45 Unit	
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur			95%	97%	99%	100%	95%	100%	99%	100%	
	Jumlah pakaian seragam			110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	
4	Meningkatnya ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim			1 ASN	2 ASN			1 ASN				
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek			12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	
	Jumlah Peserta StudiBanding			50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	
	Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak			75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	
	Meningkatnya Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu			93%	95%	97%	99%	93%	99%	97%	99%	
	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD			5 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Laporan Realisasi Semester			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian TAHUN 2019	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Desa RTS			20 Desa				20 Desa				
	Jumlah SKPD yang melakukan Verifikasi SPJ			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Laporan SIMMON Tepra Bebas Online SKPD dan SPIP			24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	
6	Meningkatnya Kualitas Dokumen Acuan Pelaksanaan Program Kegiatan			93%	96%	99%	100%	93%	100%	99%	100%	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Informasi yang diupload			20 Berita	25 berita	25 berita	25 berita	20 Berita	25 berita	25 berita	25 berita	
	Jumlah Pelaksanaan Pameran			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
7	Presentase SP2D yang diterbitkan Kurang 2 (dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit			98%	99%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	
	Jumlah SP2D yang diterbitkan			7450 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7450 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	
8	Penetapan APBD dan APBD P sesuai Ketentuan			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
9	Presentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua			90.13%	93.74%	97.49%	100%	90.13%	100%	97.49%	100%	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analitis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Presentase Penyaluran Belanja Daerah			98%	98%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	
11	Presentase Penyaljian Laporan Barang Milik Daerah Secara Benar			77.27%	81.82%	86.36%	90.91%	77.27%	90.91%	86.36%	90.91%	
12	Presentase Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Standar Satuan Harga Barang/ RKBMD yang disusun dan ditetapkan Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Presentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan			29.69%	29.78%	29.86%	29.94%	29.69%	29.94%	29.86%	29.94%	
	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah DokumenPerda APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran perubahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pertanggungjawaban			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah			1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi			8 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	8 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	
	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
	Jumlah DPA dan DPPA SKPD			132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	
	Daftar Aset yang dimiliki			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Dokumen Rancangan PPAS APBD dan Rancangan Nota Keuangan APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Terlaksananya Monev aplikasi SIMDA			1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	
	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Barang/Jasa			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Peserta Bimtek/Angkatan			70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Faktur Pajak			820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	
	Jumlah SKPD yang dinilai			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah SKPD yang dibina dalam penggunaan aplikasi penganggaran			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan			12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	
	Jumlah SPM yang diterbitkan			7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	
	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	
	Jumlah Laporan Aset			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	Jumlah PNS yang Menerima Gaji			9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	
	Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan			15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	
	Jumlah Perda dan Perkada					2 Perda				2 Perda		
	Presentase Pengembalian atas Kerugian Negara			96%	97%	98%	99%	96%	99%	98%	99%	
	Jumlah Kasus TGR			10 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	10 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone

Isu–isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, dan berbasis bermutu
2. Belum tertatanya manajemen aset daerah
3. Belum sepenuhnya laporan keuangan dan aset sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)
4. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Tagihan penjualan angsuran atas ruko, toko, kios dan lods Pasar Sentral Palakka Watampone belum didukung dengan bukti perikatan, dan pembelian yang telah lunas belum diproses bukti kepemilikannya
2. Sekitar 70% aset pemda belum tersertifikat dan ada beberapa yang belum teridentifikasi serta beberapa aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak
3. Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan tentang pengelolaan keuangan
4. Penatausahaan keuangan pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang belum tertib sepenuhnya
5. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak tertib
6. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan peraturan perundang-undangan dan teknologi informasi.

Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya pengelolaan keuangan daerah yang semakin mantap berlandaskan pada aturan pengelolaan keuangan yang jelas dan mudah dipahami dan dilaksanakan;

2. Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin terdesentralisasi pada satuan kerja yang terkecil/desa serta berbasis pada capaian kinerja;
3. Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM yang memadai dan mempunyai kapasitas sesuai dengan harapan;
4. Terciptanya kebijakan-kebijakan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Peningkatan Koordinasi antar OPD dalam rangka menciptakan kebersamaan dalam pencapaian satu tujuan, satu pikiran guna peningkatan pembangunan daerah;
6. Terlaksananya sosialisasi, bintek dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksana teknis kegiatan;
7. Terciptanya *Reward* dan *Punishment* yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan terkait APBD Daerah;
8. Penyusunan Kebijakan akuntansi sesuai dengan Juknis Permendagri dan Permenkeu serta Pelaksanaan Sosialisai terkait PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada pelaksana teknis kegiatan;
9. Pengelolaan dan Inventarisasi aset yang tertib dan berbasis Teknologi Informasi serta Peningkatan kualitas SDM khususnya pengurus barang;
10. Inventarisasi aset tetap secara cepat, tepat dan akurat;
11. Penertiban dan persertifikatan Aset Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarnya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	99%	27,717,603,200	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	99%	27,717,603,200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec. T. Riattang Barat		4332 Rekening	24,250,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec. T. Riattang Barat		4332 Rekening	24,250,000,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. T. Riattang Barat		1308 Kali	517,603,200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. T. Riattang Barat		1308 Kali	517,603,200	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat		624 Kali	250,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat		624 Kali	250,000,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1100 SPDP	800,000,000	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1100 SPDP	800,000,000	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. T. Riattang Barat		19 Paket	1,900,000,000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. T. Riattang Barat		19 Paket	1,900,000,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Kondisi Baik	100%	1,593,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Kondisi Baik	100%	1,593,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Pembangunan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		1 Paket	100,000,000	Pembangunan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		1 Paket	100,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T. Riattang Barat		2 Unit	510,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T. Riattang Barat		2 Unit	510,000,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		3 Unit	25,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		3 Unit	25,000,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		25 Unit	195,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		25 Unit	195,000,000	
	Pengadaan Mebeleur	Kec. T. Riattang Barat		100 Unit	70,000,000	Pengadaan Mebeleur	Kec. T. Riattang Barat		100 Unit	70,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		3 Paket	195,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		3 Paket	195,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T. Riattang Barat		73 Kali	300,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T. Riattang Barat		73 Kali	300,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		200 Kali	198,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		200 Kali	198,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Kehadiran ASN	100%	33,000,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Kehadiran ASN	100%	33,000,000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Kehadiran ASN	100%	33,000,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Kehadiran ASN	100%	33,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kec. T. Riattang Barat		110 Set	33,000,000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kec. T. Riattang Barat		110 Set	33,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik	100%	357,500,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik	100%	357,500,000	
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Kec. T. Riattang Barat		3 Orang	69,000,000	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Kec. T. Riattang Barat		3 Orang	69,000,000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat		12 ASN	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat		12 ASN	50,000,000	
	Sosialisasi Pajak	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	38,500,000	Sosialisasi Pajak	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	38,500,000	
	Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Luar Provinsi		2 Kegiatan	200,000,000	Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Luar Provinsi		2 Kegiatan	200,000,000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditepkn	100%	264,000,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditepkn waktu	100%	264,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
			tepat waktu								
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. T. Riattang Barat		7 Dokumen	80,000,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. T. Riattang Barat		7 Dokumen	80,000,000	
	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	Kec. T. Riattang Barat		792 Kali	95,000,000	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	Kec. T. Riattang Barat		792 Kali	95,000,000	
	Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Kec. T. Riattang Barat		12 Laporan	89,000,000	Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Kec. T. Riattang Barat		12 Laporan	89,000,000	
6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase SP2D yang terbit Kurang 2 (dua) hari Terhadap SP2D yang terbit	100%	220,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase SP2D yang terbit Kurang 2 (dua) hari Terhadap SP2D yang terbit	100%	220,000,000	
	Peningkatan Plaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah Oleh Bendahara Umum Daerah	Kec. T. Riattang Barat		8126 SP2D	220,000,000	Peningkatan Plaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah Oleh Bendahara Umum Daerah	Kec. T. Riattang Barat		8126 SP2D	220,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12	
7	Program Penujngan Pemerintahan Umum		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	100%	122,000,000	Program Penujngan Pemerintahan Umum		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	100%	122,000,000		
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang Barat		6 Dokumen	37,000,000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang Barat		6 Dokumen	37,000,000		
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang Barat		25 Berita	15,000,000	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang Barat		25 Berita	15,000,000		
	Promosi dan pameran pembangunan	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	70,000,000	Promosi dan pameran pembangunan	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	70,000,000		
8	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	15.76%	6,079,594,000	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	15.76%	6,079,594,000		
			Ketetapan waktu penetapan APBD dan perubahan APBD sesuai ketentuan	Tepat Waktu				Ketapan waktu penetapan APBD dan perubahan APBD sesuai ketentuan	Tepat Waktu			
			Persentase Belanja langsung terhadap total APBD	50.00%				Persentase Belanja Tidak langsung terhadap total APBD	50.00%			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12	
			Percentase Belanja Pendidikan Terhadap total APBD	21,96%				Percentase Belanja Pendidikan Terhadap total APBD	21,96%			
			Percentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD secara Benar	86,36%				Percentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD secara Benar	86,36%			
			Percentase Penyajian LKSKPD sesuai SAP berbasis akrual	97,49%				Percentase Penyajian LKSKPD sesuai SAP berbasis akrual	97,49%			
			Percentase Penyaluran Belanja Daerah	97,59%				Percentase Penyaluran Belanja Daerah	97,59%			
			Percentase SILPA terhadap total APBD	2,41%				Percentase SILPA terhadap total APBD	2,41%			
			Percentase Bidang Lahan Aset Daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan	29,86%				Percentase Bidang Lahan Aset Daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan	29,86%			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
			Persentase Belanja Langsung Terhadap APBD	50.00%				Persentase Belanja Langsung Terhadap APBD	50.00%		
			Persentase Belanja Modal Terhadap APBD	30%				Persentase Belanja Modal Terhadap APBD	30%		
	Penyusunan Analisa Standar Belanja Pengelolaan Keuangan Daerah			1 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Analisa Standar Belanja Pengelolaan Keuangan Daerah			1 Dokumen	100,000,000	
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	125,000,000	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	125,000,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	658,718,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	658,718,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	270,400,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	270,400,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	168,250,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	168,250,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Cat Penting
NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	290,850,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	290,850,000		
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	239,200,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	239,200,000		
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	228,592,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	228,592,000		
	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	244,000,000	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	244,000,000		
	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	9 Kegiatan	338,000,000	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	9 Kegiatan	338,000,000		
	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Kec. T. Riattang Barat		3 Laporan	256,000,000	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Kec. T. Riattang Barat		3 Laporan	256,000,000		

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		132 DPA/DPPA	235,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		132 DPA/DPPA	235,000,000	
	Pengamanan Aset Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	180,000,000	Pengamanan Aset Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	180,000,000	
	Penyusunan Prioritas dan Pafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	115,544,000	Penyusunan Prioritas dan Pafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	115,544,000	
	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	120,640,000	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	120,640,000	
	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Kec. T. Riattang Barat		2 Kegiatan	50,000,000	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Kec. T. Riattang Barat		2 Kegiatan	50,000,000	
	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	65,000,000	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	65,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	70,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	70,000,000	
	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1570 Faktur	122,000,000	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1570 Faktur	122,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Laporan	134,000,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Laporan	134,000,000	
	Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	296,400,000	Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	296,400,000	
	Pengelolaan administrasi data kearsipankuangan	Kec. T. Riattang Barat		12 Kali	20,000,000	Pengelolaan administrasi data kearsipankuangan	Kec. T. Riattang Barat		12 Kali	20,000,000	
	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Kec. T. Riattang Barat		5025 SPM	280,000,000	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Kec. T. Riattang Barat		5025 SPM	280,000,000	
	Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		12 Laporan	257,000,000	Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		12 Laporan	257,000,000	
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	350,000,000	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	350,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		792 Laporan	198,000,000	Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		792 Laporan	198,000,000	
	Pelaporan Aset	Kec. T. Riattang Barat		2 Laporan	130,000,000	Pelaporan Aset	Kec. T. Riattang Barat		2 Laporan	130,000,000	
	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Kec. T. Riattang Barat		15 HGB	142,000,000	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Kec. T. Riattang Barat		15 HGB	142,000,000	
	Pengelolaan Gaji	Kec. T. Riattang Barat		112464 PNS	245,000,000	Pengelolaan Gaji	Kec. T. Riattang Barat		112464 PNS	245,000,000	
	Penyusunan Ramperda dan Ramperkada terkait pengelolaan keuangan	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	150,000,000	Penyusunan Ramperda dan Ramperkada terkait pengelolaan keuangan	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	150,000,000	
9	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase tindak lanjut temuan kerugian negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR	98%	160,000,000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase tindak lanjut temuan kerugian negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR	98%	160,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Peningkatan Pelaksanaan TGR	Kec. T. Riattang Barat		12 Kasus	160,000,000	Peningkatan Pelaksanaan TGR	Kec. T. Riattang Barat		12 Kasus	160,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 89 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2020 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Namun demikian terkait dengan usulan alokasi untuk hibah bansos, BPKAD mengalokasikan anggaran dalam belanja tidak langsung berdasar rekomendasi di OPD yang sesuai kewenangannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri RI

Adapun Visi Kementerian Dalam Negeri RI adalah *"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Berdasarkan Visi tersebut Kemendagri merumuskan tujuan yaitu diantaranya *"Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah"*, dengan sasaran strategis meningkatkannya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Kemendagri RI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.

Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemendagri RI telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategis sebagai berikut:

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
2. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi /Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
3. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
4. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah
5. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
6. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
7. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;

Mengkaji visi dan misi Kementerian Dalam Negeri RI memberikan tantangan bagi BPKAD Kabupaten Bone untuk:

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone secara tepat waktu;
2. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatkan kualitas belanja pada pelayanan masyarakat, terutama bidang infrastruktur 5%, bidang kesehatan 10%, dan bidang pendidikan 20%; dan
4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan fiskal daerah.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI adalah *"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"*

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan;

4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kabupaten Bone untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Telaah Renstra Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan RI yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yakni sebagai berikut:

Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, melalui strategi:

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:

- a. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang berkualitas;
 - b. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan
- Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka Perencanaan anggaran yang berkualitas adalah:
- 1) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;
 - 2) Pencanaan program penghematan dengan pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dan pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (quick wins);
 - 3) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;
 - 4) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
 - 5) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat mandatory spending seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa dan lainnya;

- 6) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energy;
- 7) Peningkatan sinergi dan kapasitas stakeholders penganggaran.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan adalah;

- 1) Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi- fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap danadekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2) Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;
- 3) Mengembangkan system transfer yang meminimumkan ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan;
- 4) Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi efektif dan efisien;
- 5) Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan pinjaman dan diminati oleh daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penyediaan pelayanan publik;
- 6) Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif;
- 7) Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang bersifat spesifik;
- 8) Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar.

Telaah Renstra Badan Pemeriksa Keuangan RI

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-2020, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai berikut:

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, melalui strategi:

Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK,

sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu:

- a. Komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa;
- b. Komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Kementerian Keuangan RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI, maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada

Adapun Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah *"Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib, Taat Aturan, Transparan dan Akuntabel"*. Berdasarkan Tujuan tersebut BPKD Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran yaitu *"Optimalisasi Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah"*.

Telaahan Renstra BPKD Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan

yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yakni sebagai berikut:

Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan adalah:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik di 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan
2. Mendorong terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik

Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain:

- | | |
|-----------|---|
| Tujuan 1 | : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih |
| Indikator | : 1. Nilai SAKIP BPKAD atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB
2. Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD |

- Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKAD dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efesien, akuntabel dan kompetitif.

Tabel. 3.2
Matrix Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih Indikator: 1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP BPKAD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP BPKAD atas hasil evaluasi Inspektorat/ Kemenpan RB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efesien, akuntabel dan kompetitif	Opini BPK-RI berdasarkan hasil audite terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase penyajian laporan barang milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang milik daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kabupaten Bone. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD,

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memerhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah. Pemerintahan provinsi /Kabupaten /Kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah dengan tetap memerhatikan RPJMD.
2. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penataan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan sendiri.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI melalui penataan kelembagaan ,serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan system akuntansi pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Daerah;
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan pada upaya –upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK RI;

5. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memerhatikan petunjuk teknis kementerian /lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang koordianasi penyusunan petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
6. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintahan daerah permanen dan nonpermanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan pemerintahan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah;
7. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten /kota ke provinsi dan kepusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Bone dalam menyusun program dan kegiatan bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- 2) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- 3) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- 4) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 5) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3. Administrasi Umum

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 8) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 9) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 11) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 12) Pengadaan Mebeleur
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 16) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
- 4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 2) Pengadaan Pakaian Korpri
 - 3) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - 5) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- 5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 8. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel

- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 12. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
 - 1) Penyusunan KUA dan PPAS
 - 2) Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 3) Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
 - 4) Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
 - 5) Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
 - 6) Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
 - 7) Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
 - 8) Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
 - 9) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- 13. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
 - 1) Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - 2) Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
 - 3) Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
 - 4) Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
 - 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
 - 7) Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 14. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

- 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
- 4) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 5) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 6) Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial
- 7) Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- 15. Kegiatan Penunjang Urusan**
 - 1) Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
- 16. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - 11) Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 17. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
 - 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - 7) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 18. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

- 5) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 6) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 7) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

19. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

20. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
- 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 5) Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 6) Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
- 7) Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
- 8) Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 9) Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 10) Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

21. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Penyusunan Standar Harga
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4) Pengamanan Barang Milik Daerah
- 5) Penilaian Barang Milik Daerah
- 6) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 7) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 8) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kebijakan umum sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih yang selanjutnya ditentukan program pembangunan daerah dan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone. Rencana kerja dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan unit kerja. Secara keseluruhan rencana kerja dan alokasi anggaran untuk program kegiatan BKAD Kabupaten Bone pada Tahun Anggaran 2022 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 521.084.031.977,- terdiri dari:

1. Belanja Operasi, sebesar Rp. 504.450.162.487 dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD, tunjangan daerah dan iuran Askzes PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 917.349.450
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 8.000.000.000
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 7.716.520.040

Tabel.4.1
Rencana Belanja BPKAD Tahun 2022

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Operasi	504.450.162.487	96,81
2	Belanja Modal	917.349.450	0,18
3	Belanja Tak Terduga	8.000.000.000	1,54
4	Belanja Transfer	7.716.520.040	1,48
	JUMLAH	521.084.031.977	100

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKAD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju

RENCANA TAHUN 2022											
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	TARGET TAHUNAN	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
					504.450.162.487	917.349.450	8.000.000.000	7.716.520.040	521.084.031.977		573.192.435.175
	BIDANG SEKRETARIAT BPKAD				47.121.542.969	917.349.450	-	-	48.038.892.419		52.842.781.661
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				47.121.542.969	917.349.450	-	-	48.038.892.419		52.842.781.661
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				496.964.500	-	-	-	496.964.500	9	546.660.950
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	174.762.650	-	-	-	174.762.650	2	192.238.915
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	62.245.000	-	-	-	62.245.000	1	68.469.500
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30.349.050	-	-	-	30.349.050	1	33.383.955
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	41.088.000	-	-	-	41.088.000	1	45.196.800
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	144.322.500	-	-	-	144.322.500	7	158.754.750
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	44.197.300	-	-	-	44.197.300	4	48.617.030
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.322.601.076	-	-	-	17.322.601.076	12	19.054.861.184
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17.322.601.076	-	-	-	17.322.601.076	12	19.054.861.184

RENCANA TAHUN 2022											
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	TARGET TAHUNAN	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	384.761.000	-	-	-	384.761.000	122	423.237.100
				Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	89.500.000	-	-	-	89.500.000	110	98.450.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30.261.000	-	-	-	30.261.000		33.287.100
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50.000.000	-	-	-	50.000.000	3	55.000.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	215.000.000	-	-	-	215.000.000	12	236.500.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.721.352.660	-	-	-	2.721.352.660	101	2.993.487.926
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	556.108.360	-	-	-	556.108.360	15	611.719.196
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	81.757.300	-	-	-	81.757.300	12	89.933.030
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	519.845.600	-	-	-	519.845.600	20	571.830.160
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	332.841.400	-	-	-	332.841.400	58.742	366.125.540
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	430.000.000	-	-	-	430.000.000	50	473.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	800.800.000	-	-	-	800.800.000	1.100	880.880.000

RENCANA TAHUN 2022											
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	TARGET TAHUNAN	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	917.349.450	-	-	917.349.450	38	1.009.084.395
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	513.850.000	-	-	513.850.000		565.235.000
		Pengadaan Mebel		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	46.000.000	-	-	46.000.000	28	50.600.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	357.499.450	-	-	357.499.450		393.249.395
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.750.058.433	-	-	-	25.750.058.433	38	28.325.064.276
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	83.108.700	-	-	-	83.108.700	3.467	91.419.570
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	24.969.814.533	-	-	-	24.969.814.533	4.332	27.466.795.986
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	697.135.200	-	-	-	697.135.200	120	766.848.720
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				445.805.300	-	-	-	445.805.300	89	490.385.830
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	176.850.000	-	-	-	176.850.000	45	194.535.000
		Pemeliharaan Mebel		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	1	-

RENCANA TAHUN 2022											
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	TARGET TAHUNAN	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	106.900.000	-	-	-	106.900.000	40	117.590.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	162.055.300	-	-	-	162.055.300	3	178.260.830
	BIDANG ANGGARAN				3.330.249.620	-	-	-	3.330.249.620		3.663.274.582
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				455.842.190.290	-	8.000.000.000	7.716.520.040	471.558.710.330		518.714.581.363
1	Kordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3.330.249.620	-	-	-	3.330.249.620	17	3.663.274.582
			Kordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	182.414.250	-	-	-	182.414.250	2	200.655.675
			Kordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	203.815.600	-	-	-	203.815.600	1	224.197.160
			Kordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	206.940.680	-	-	-	206.940.680	2	227.634.748
			Kordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	204.280.980	-	-	-	204.280.980	1	224.709.078
			Kordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	106.036.360	-	-	-	106.036.360	1	116.639.996
			Kordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	109.747.300	-	-	-	109.747.300	1	120.722.030

RENCANA TAHUN 2022											
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	TARGET TAHUNAN	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.132.986.800	-	-	-	1.132.986.800	2	1.246.285.480
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	345.677.300	-	-	-	345.677.300	2	380.245.030
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	443.113.000	-	-	-	443.113.000	2	487.424.300
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	220.353.800	-	-	-	220.353.800	1	242.389.180
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	174.883.550	-	-	-	174.883.550	1	192.371.905
	BIDANG PERBENDAHARAAN					1.657.067.550				1.657.067.550	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.657.067.550	-	-	-	1.657.067.550	37	1.822.774.305
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	252.951.800	-	-	-	252.951.800	7.500	278.246.980
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pemberitan Anggaran Kas dan SPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	321.800.700	-	-	-	321.800.700	7.000	353.980.770

No	RENCANA TAHUN 2022										TARGET TAHUNAN	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah			
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer				
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	160.152.500	-	-	-	160.152.500	12	176.167.750	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	247.725.000	-	-	-	247.725.000	12	272.497.500	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	152.559.750	-	-	-	152.559.750	12	167.815.725	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	192.644.000	-	-	-	192.644.000	12	211.908.400	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	329.233.800	-	-	-	329.233.800	66	362.157.180	
BIDANG AKUNTANSI					1.331.995.020	-	-	-	1.331.995.020		1.465.194.522	

RENCANA TAHUN 2022											TARGET TAHUNAN	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah			
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer				
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				450.854.873.120	-	8.000.000.000	7.716.520.040	466.571.393.160	12	513.228.532.476	
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	260.442.280	-	-	-	260.442.280	4	286.486.508	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	191.789.850	-	-	-	191.789.850	4	210.968.835	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	536.372.110	-	-	-	536.372.110	4	590.009.321	
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	141.228.130	-	-	-	141.228.130	4	155.350.943	
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	76.585.750	-	-	-	76.585.750	4	84.244.325	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	125.576.900	-	-	-	125.576.900	4	138.134.590	

RENCANA TAHUN 2022												
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	TARGET TAHUNAN	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer				
	BENDAHARA BANTUAN				449.522.878.100	-	8.000.000.000	7.716.520.040	465.239.398.140		511.763.337.954	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	449.522.878.100	-	-	-	449.522.878.100		494.475.165.910	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	8.000.000.000	-	8.000.000.000		8.800.000.000	
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-	7.716.520.040	7.716.520.040		8.488.172.044	
	BIDANG ASET				1.486.429.228				1.486.429.228		1.635.072.151	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.486.429.228	-	-	-	1.486.429.228		1.635.072.151	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.486.429.228	-	-	-	1.486.429.228	10	1.635.072.151	
			Penyusunan Standar Harga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	308.844.700	-	-	-	308.844.700	2	339.729.170	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	96.863.360	-	-	-	96.863.360	2	106.549.696	
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	159.780.830	-	-	-	159.780.830	3	175.758.913	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	308.085.620	-	-	-	308.085.620	66	338.894.182	
			Penilaian Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	174.806.540	-	-	-	174.806.540	66	192.287.194	

RENCANA TAHUN 2022										No
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	TARGET TAHUNAN	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	117.502.540	-	-	-	117.502.540	2	129.252.794
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200.008.958	-	-	-	200.008.958	2	220.009.854
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	120.536.680	-	-	-	120.536.680	1	132.590.348

BAB V

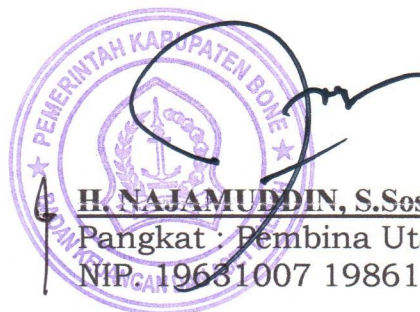
PENUTUP

Rencana Kerja BKAD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja BKAD tahun 2021 merupakan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah tahun kedua RPJMD dan Renstra BPKAD tahun 2018-2023 ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja BPKAD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bone

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Watampone, 29 Juli 2021
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB. BONE


H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631007 198611 1 002

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	2.05	02	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina yang Bersertifikat	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	133 Orang	122 Persentase	89.500.000		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	98.450.000
5	02	01	2.05	09	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina yang Bersertifikat	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 ASN	122 Persentase	30.261.000		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	33.287.100
5	02	01	2.05	10	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina yang Bersertifikat	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 laporan	122 Persentase	50.000.000		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	55.000.000
5	02	01	2.05	11	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina yang Bersertifikat	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Kegiatan	122 Persentase	215.000.000		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	236.500.000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.721.353.660				2.993.487.916
5	02	01	2.06	02	Persentase Rata-rata Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT SETIAP Tahun anggaran	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	101 Persentase	556.109.360		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	611.719.116
5	02	01	2.06	03	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT SETIAP Tahun anggaran	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	380 Buah	101 Persentase	81.757.300		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	89.933.000
5	02	01	2.06	04	Persentase Rata-rata Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT SETIAP Tahun anggaran	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	107 Orang	101 Persentase	519.845.600		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	571.830.110
5	02	01	2.06	05	Persentase Rata-rata Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT SETIAP Tahun anggaran	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	587842 Lembar	101 Persentase	332.841.400		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	366.125.510

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
								Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Tolok Ukur
5	02	01	2.06	06	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT SETIAP Tahun anggaran	100 Persen	624 Kali	101 Persentase	430,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	473,000,000
5	02	01	2.06	09	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah SPPD	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT SETIAP Tahun anggaran	100 Persen	1100 SPPD	101 Persentase	800,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	880,880,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,009,084,315
5	02	01	2.07	01	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Rata-Rata capaian kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	100 Persen	1 Unit	38 Persentase	513,850,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	565,235,000
5	02	01	2.07	05	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Mebel	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	100 Persen	10 unit	38 Persentase	46,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	50,600,000
5	02	01	2.07	06	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	100 Persen	12 Paket	38 Persentase	355,843,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	393,249,315
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										28,325,064,216
5	02	01	2.08	01	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	3467 Surat	6 Persentase	83,108,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	91,419,500
5	02	01	2.08	02	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Rekening yang Dibayar	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	4332 Rekening	Persentase	24,969,814,533	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	27,466,795,916
5	02	01	2.08	04	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak yang Menerima Tunjangan dalam Setahun	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	1308 Kali	6 Persentase	697,135,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	766,848,700

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
								Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										521,283,749	
				Pemeliharaan Jasa Penyediaan Jasa											
5	02	01	2.09	01	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	35 unit	6 Persentase	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	194,535,010
5	02	01	2.09	05	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	6 Persentase	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	30,897,910
5	02	01	2.09	06	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	200 Kali	6 Persentase	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	117,590,010
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Paket	6 Persentase	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	178,260,810
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										471,558,710,330	518,736,581,313
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										3,330,249,620	3,663,274,512
5	02	02	2.01	01	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Penyaluran Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 dokumen	17 Persentase	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	200,655,615
5	02	02	2.01	02	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Persentase Penyaluran Rencana Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 dokumen	17 Persentase	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	224,197,110
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan RKA-SKPD	Persentase Penyaluran Rencana Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 dokumen	17 Persentase	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	227,634,748

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.01	04	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen penyusunan perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyaluran Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 dokumen	17 Persentase	204.280.980	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	224.709.078
5	02	02	2.01	05	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penyaluran Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 dokumen	17 Persentase	106.036.360	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	116.639.916
5	02	02	2.01	06	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen penyusunan perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyaluran Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 dokumen	17 Persentase	109.747.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	120.722.010
5	02	02	2.01	07	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala daerah tentang penjabaran APBD	Persentase Penyaluran Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 dokumen	17 Persentase	1.132.986.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	1.246.285.410
5	02	02	2.01	08	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen penyusunan perubahan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Persentase Penyaluran Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 dokumen	17 Persentase	345.677.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	380.245.010
5	02	02	2.01	09	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Persentase Penyaluran Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 dokumen	17 Persentase	443.113.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	487.424.310
5	02	02	2.01	11	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan anggaran belanja daerah	Persentase Penyaluran Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 dokumen	17 Persentase	220.353.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	242.389.110
5	02	02	2.01	13	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen penyusunan pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Persentase Penyaluran Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 dokumen	17 Persentase	174.883.550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	192.371.915
02	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Terbendaharaan Daerah											1.844.774.315	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah												
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah												
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
Tolok Ukur	Target											
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah pelaporan administrasi keuangan	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 laporan	97.24 Persentase	252,951,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 Persen	278,246,970
5 02 02 2.02 03	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Kas dan SPD	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah SPD yang diterbitkan	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 laporan	97.24 Persentase	321,800,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 Persen	353,980,770
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah pelaksanaan dana perimbangan transfer	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 laporan	97.24 Persentase	160,152,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 Persen	176,167,710
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pengeluaran/Pemotongan dan Penyetoran Penghitungan Pihak Ketiga (PHK)	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah laporan realisasi aliran KAS dan PHK	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 laporan	97.24 Persentase	247,725,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 Persen	272,497,510
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pengeluaran dan Pengeluaran Atas APBD dengan Instansi Terkait	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 laporan	97.24 Persentase	152,559,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 Persen	167,815,775
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pembiayaan dan Pengeluaran Sub Kegiatan	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 laporan	97.24 Persentase	192,644,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 Persen	211,908,410
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Pemantauan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 laporan	97.24 Persentase	329,233,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 Persen	384,157,110
02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								1,331,995,020			1,465,194,512

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akuntansi	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 laporan	97.49 Persentase		Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	286,486,508
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pe merintah Daerah	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Laporan Keuangan PMDA		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akuntansi	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	7 Laporan	97.49 Persentase		Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	210,968,805
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Pe aturan Daerah tentang Pe tanggungjawab Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pe jabatan Pe tanggungjawab Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjawaban		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akuntansi	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	66 SKPD	97.49 Persentase		Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	590,009,321
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pe tanggungjawab Pelaksanaan APBD	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban APBD		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akuntansi	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	66 SKPD	97.49 Persentase		Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	155,350,943
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Pe yelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akuntansi	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	97.49 Persentase		Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	84,244,325
5 02 02 2.03 11	Pe nbiinan Akuntansi, Pelaporan dan Pe tanggungjawab Pe merintah Kabupaten/Kota	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Pembina dalam Pelaporan		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akuntansi	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	792 Laporan	97.49 Persentase		Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	138,134,500
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												511,763,337,954
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Pe yaluran Bantuan Keuangan	Cekupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan		Persentase Penyaluran Belanja DaerahCakupan Realisasi Jasa Penyediaan Jan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Rekening	38 Persentase		Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	494,475,165,910

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Praktiran Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Penyaluran Belanja DaerahCakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	2 Rekening	8,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	8,800,000,000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Dana Bagi Hasil	Persentase Penyaluran Belanja DaerahCakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	2 Rekening	7,716,520,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan realisasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 Persen	8,488,172,044
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah									
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen analisis standar harga satuan barang	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	86,36 Persen	100 dokumen	308,844,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan;	86,36 Persen	339,729,170
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penyusunan kebutuhan barang milik daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	86,36 Persen	75 dokumen	96,863,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan;	86,36 Persen	106,549,696
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan pengelolaan aset daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	86,36 Persen	100 dokumen	159,780,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan;	86,36 Persen	175,758,913
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah pengamanan aset milik daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	86,36 Persen	100 dokumen	308,085,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan;	86,36 Persen	338,894,182
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dinilai	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	86,36 Persen	99 laporan	174,806,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan;	86,36 Persen	192,287,194
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat hak guna bangunan	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	86,36 Persen	100 SHGB	117,502,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan;	86,36 Persen	129,252,794

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				
								Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target		
5	02	03	2.01	11	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan;	jumlah laporan aset	Persentase Penyaljian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,36 Persen	100 laporan	100 Persentase	200,008,958	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan;	86,36 Persen	220,009,854
5	02	03	2.01	13	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan;	jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah	Persentase Penyaljian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,36 Persen	99 laporan	100 Persentase	120,536,680	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan;	86,36 Persen	132,590,348
TOTAL											521,084,031,977		573,245,333,094			